

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan adalah satu hal terpenting dan mendasar untuk setiap individu atau masyarakat yang juga dapat dikatakan sebagai hak asasi, terlebih bagi suatu bangsa dimana pendidikan menjadi aset yang berharga dan penting dalam kemajuan bangsa. Indonesia yang merupakan negara berkembang tidak dapat mengesampingkan sumber daya manusia yang ada, karena penentu arah bagi sebuah negara untuk bergerak adalah warga negara. Dengan demikian hak dari setiap warga negara adalah mendapatkan pendidikan dan wajib untuk mengikuti tingkatan pendidikan yang dimulai dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah maupun tinggi.

Pendidikan bukan hanya kebutuhan hukum, tetapi juga kebutuhan praktis. Pendidikan berfungsi sebagai sarana untuk mengasah dan membentuk watak, kepribadian, dan peradaban yang bermartabat dalam kehidupan sehari-hari, dengan kata lain, pendidikan bertujuan untuk memanusiakan manusia sehingga mereka dapat menjadi manusia nyata yang berperilaku sesuai dengan standar sosial yang menjadi landasannya.

Peran penting yang dimiliki pendidikan sebagai penentu kualitas warga dikarenakan pendidikan adalah investasi seseorang untuk masa depannya yang terkadang dianggap sebagai penentu kesuksesan seseorang. Seiring kemajuan dan perubahan zaman, setiap orang berlomba-lomba untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Setiap orang, termasuk anak-anak, ingin mengenyam pendidikan yang layak guna menjamin masa depan mereka, namun tidak semua orang bisa

mendapatkan dan menikmati manfaat dari pendidikan. Hal tersebut sesuai dengan yang kita ketahui bersama, bahwa kesulitan ekonomi pun bisa berdampak pada pendidikan seseorang.

Peranan penting pendidikan di Indonesia adalah sebagai pencerdas kehidupan bangsa. Dengan demikian, dalam skenario ini, pemerintah Indonesia bertanggung jawab atas pendidikan warganya. Bahwa pemerintah melindungi dan menjamin hak setiap warga negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap orang memiliki hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, hak atas pendidikan, dan keunggulan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, yang semuanya berkontribusi pada peningkatan kehidupan dan kesejahteraan umat manusia¹. Selain itu, Pemerintah dan Pemerintah Daerah memiliki komitmen untuk melayani, memfasilitasi, dan menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi seluruh warga negara tanpa memandang ras atau suku².

Seluruh rakyat Indonesia tanpa dibedakan, berhak atas pendidikan yang layak, unggul, dan benar karena pentingnya pendidikan dalam kehidupan setiap orang. Masih banyak anak muda yang kekurangan sumber daya yang diperlukan untuk bersekolah. Dalam hal pendidikan, salah satu variabel terpenting adalah status keuangan atau kemampuan masyarakat untuk membayarnya. Hal ini dikarenakan banyak orang tua yang tidak mampu membiayai sekolah anaknya. Ketidaksenangan orang tua berasal dari kenyataan bahwa pendidikan telah menjadi terlalu mahal, baik untuk negara maupun untuk siswa individu. Orang tua menyangkan tingginya biaya pendidikan, termasuk biaya langsung dan tidak

¹ Pasal 28C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

² Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

langsung yang ditanggung siswa. Siswa menanggung pengeluaran langsung seperti biaya sekolah, pakaian atau seragam sekolah, serta buku dan alat tulis, sedangkan biaya tidak langsung seperti biaya kursus, biaya transportasi, tunjangan siswa, dan biaya lainnya yang ditanggung bersama oleh siswa.

Dalam menanggapi hal tersebut, beberapa upaya telah dilakukan pemerintah demi mewujudkan bentuk tanggung jawab terhadap pendidikan masyarakatnya. Upaya tersebut berupa bantuan yang diberikan kepada sekolah maupun langsung kepada siswanya. Contohnya antara lain Program Bantuan Operasional Sekolah, atau yang biasa kita sebut dengan Dana BOS; Program Bantuan Siswa Miskin, atau BSM; dan Program Indonesia Pintar yang memberikan bantuan tunai pendidikan kepada anak usia sekolah (6-21 tahun) dari keluarga berpenghasilan rendah yang rentan kemiskinan. Sedangkan Program Indonesia Pintar ini merupakan versi yang lebih disempurnakan dari Program Bantuan Siswa Miskin (BSM).

Peraturan yang mengatur Program Indonesia Pintar sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016, yang kemudian diperbarui atau diganti dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020. Program Indonesia Pintar adalah bantuan pemerintah dalam bentuk uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar yang diberikan kepada siswa dari keluarga berpenghasilan rendah atau rentan dalam membiayai pendidikannya³. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020.

³ Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar

Salah satu proyek jaminan sosial sektor pendidikan, Program Indonesia Pintar berupaya menjawab persoalan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan, khususnya di kalangan masyarakat miskin. Program Indonesia Pintar merupakan bagian dari upaya pemerintah Indonesia dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mencegah siswa putus sekolah atau putus sekolah karena kesulitan ekonomi, Program Indonesia Pintar bertujuan untuk meningkatkan akses layanan pendidikan bagi anak usia 6 hingga 21 tahun hingga akhir satuan pendidikan menengah, mendukung program wajib belajar 12 tahun, mengurangi biaya pendidikan, dan menarik siswa yang putus sekolah atau meninggalkan pendidikan mereka karena kesulitan ekonomi untuk kembali bersekolah. Program Indonesia Pintar diharapkan dapat menghilangkan anak putus sekolah karena kekurangan biaya sekolah.

Sasaran Program Indonesia Pintar yaitu pada jenjang pendidikan SD, SMP, SMA, SMK dan jenjang perguruan tinggi. Dimana yang menjadi fokus penulis dalam penelitian yaitu pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP). Beberapa Provinsi yang menerima dana Program Indonesia Pintar terbanyak ada pada Provinsi Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Banten⁴. Untuk Provinsi Jawa Tengah di tahun 2020, total pencairan dana Program Indonesia Pintar sebanyak 1.941.594 siswa dari 2.604.973 jumlah siswa

⁴ Hartini Retnaningsih, "Program Indonesia Pintar: Implementasi Kebijakan Jaminan Sosial Bidang Pendidikan (Studi Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan)", *Aspirasi*, Vol.8 No. 2, Desember 2017, halaman 163.

yang disalurkan. Dari jumlah tersebut, jenjang Sekolah Menengah Pertama mendapat pencairan 491.147 dari 633.991 jumlah siswa yang disalurkan⁵.

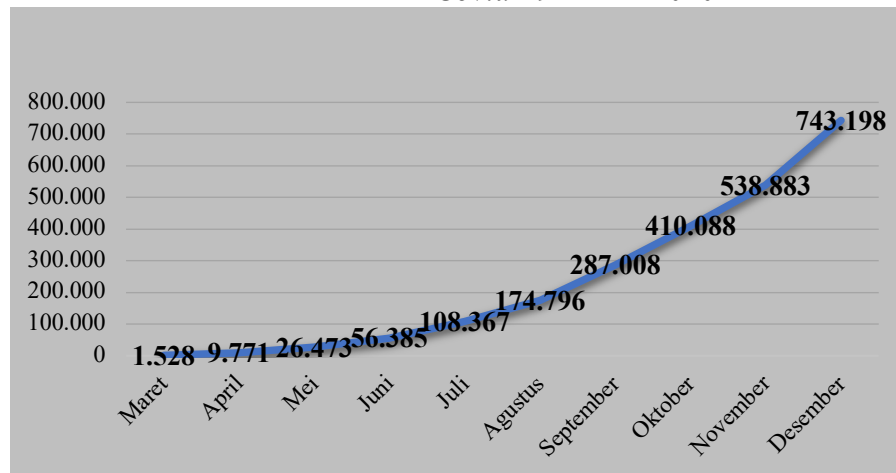
Penelitian ini tidak hanya membahas tentang pelaksanaan atau hambatan yang ada pada implementasi Program Indonesia Pintar, hal tersebut karena penelitian yang dilakukan berbeda dengan penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya. Perbedaan tersebut terdapat pada Pelaksanaan Program Indonesia Pintar jenjang SMP di Kota Semarang yang dilaksanakan di masa pandemi *Covid-19* tahun 2020-2021 yang muncul sebagai permasalahan baru di Indonesia.

Terjadinya bencana pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang telah menjangkit seluruh dunia dan mulai masuk di Indonesia pada awal tahun 2020 menyebabkan banyak sektor terhambat, termasuk pada sektor pendidikan. Karantina wilayah dan kebijakan pembatasan sosial sedang diterapkan di sejumlah negara untuk membatasi penyebaran virus *covid-19* dan dengan demikian meminimalkan penularan virus. Orang tidak dapat atau diharuskan untuk meminimalkan kontak langsung satu sama lain sebagai akibat dari penyakit tersebut.

Dalam rangka memutus rantai persebaran *covid-19*, pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Penerapan kebijakan ini mulai berlaku sejak 31 Maret hingga 11 Januari 2021. Hal ini dilakukan karena kasus pasien terindikasi *covid-19* masih belum menunjukkan angka penurunan. Berikut data kasus *covid-19* di Indonesia hingga bulan Desember tahun 2020.

⁵ Kemdikbud.go.id, "Data Penyaluran Dana Program Indonesia Pintar Tahun 2020", Diakses dari <https://pip.kemdikbud.go.id/wilayah/data2020/03>, Pada Tanggal 10 November 2020.

Gambar 1.1
Grafik data kasus *Covid-19* Tahun 2020



Sumber : Website resmi Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Berdasarkan gambar 1.1 menunjukkan kenaikan secara terus menerus pada kasus aktif *covid-19* di Indonesia hingga bulan Desember tahun 2020. Kenaikan tersebut terkonfirmasi oleh setiap provinsi, yang pertama DKI Jakarta dengan jumlah kasus 130.461. Selanjutnya ada Jawa Tengah dengan kasus sebanyak 59.398. Selanjutnya urutan ketiga ada di Jawa Tengah mencapai 50.321 kasus. Berikutnya sebanyak 49.706 kasus yang ada di Jawa Barat. Dan urutan terakhir yaitu 18.944 kasus yang ada di Sumatera Barat⁶.

Pembatasan sosial ini pun membawa pengaruh terhadap dunia pendidikan terkhusus pada cara atau pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (KBM). Hampir semua sektor membatasi kegiatan yang dilakukan secara langsung demi mengurangi penyebaran kasus *covid-19*. Hal ini juga didukung oleh regulasi terkait Belajar Online dan Bekerja dari Rumah Dalam Rangka Pencegahan Penyakit Virus Corona (*COVID-19*)⁷. Selanjutnya didukung dengan surat edaran resmi bertajuk Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Upaya Pencegahan

⁶ Bnbp.go.id, "Data Kasus Covid-19 Tahun 2020", diakses dari <https://bnbp.go.id/cari?q=data+kasus+covid-19+tahun+2020>, Pada Tanggal 12 Januari 2021.

⁷ SE resmi dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36962/MPK.A/HK/2020.

Penyebaran *Covid-19* di Instansi Pemerintah⁸. Surat Edaran tersebut berisi tentang tugas dinas yang dilakukan ASN selama bekerja dari rumah (*Work From Home*) sebagai bentuk terbebasnya lingkungan instansi pemerintah dari akibat penyebaran *Covid-19*, serta sebagai upaya pencegahannya.

Dalam masa pandemi dan dengan kebijakan-kebijakan baru yang sudah ditetapkan pemerintah, Program Indonesia Pintar harus tetap dilaksanakan. Pada pelaksanaan Program Indonesia Pintar tahun 2020, pencairan dana Program Indonesia Pintar jenjang SMP (Sekolah Menengah Pertama) di Kota Semarang baru mencapai presentase 57,44%. Berikut data siswa penerima pencairan Program Indonesia Pintar jenjang SMP (Sekolah Menengah Pertama) tahun 2020.

Tabel 1.1

Tabel Siswa yang menerima pencairan dana Program Indonesia Pintar jenjang SMP di wilayah karesidenan Semarang tahun 2020

Kabupaten/Kota	Jumlah Siswa Yang Disalurkan	Jumlah Siswa Yang Menerima Pencairan	Presentase Pencairan
Kota Semarang	21.552	12.380	57,44%
Kabupaten Semarang	13.809	10.254	74,26%
Kota Salatiga	3.431	2.329	67,88%
Kabupaten Kendal	16.467	11.743	71,31%
Kabupaten Demak	17.627	12.427	70,50%
Kabupaten Grobogan	22.295	17.133	76,85%

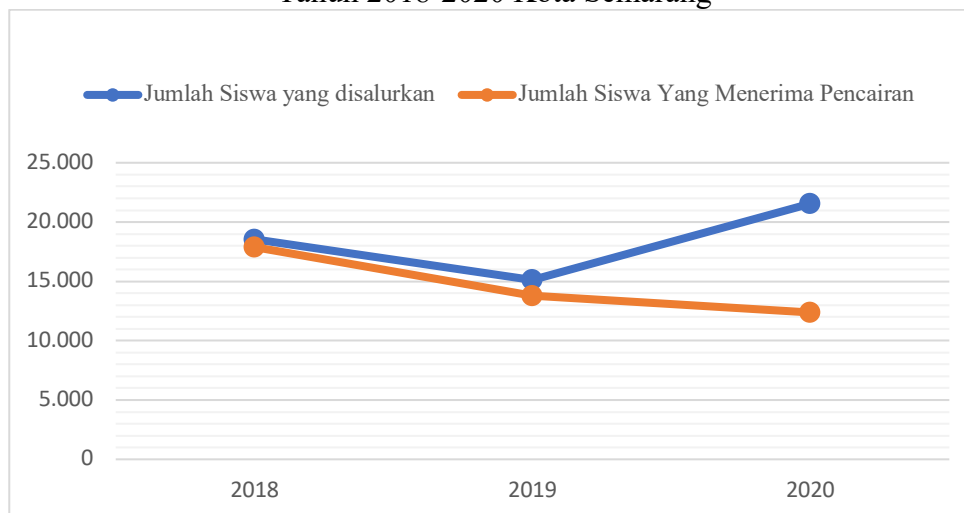
Sumber: kemdikbud.go.id (Data penyaluran dana PIP per wilayah Tahun 2020)

Berdasarkan tabel 1.1 dapat diketahui bahwa presentase jumlah pencairan Program Indonesia Pintar jenjang Sekolah Menengah Pertama, Kota Semarang memiliki presentase pencairan yang paling rendah di wilayah Karesidenan Semarang. Padahal jika dilihat pada tabel 1.1 jumlah siswa yang disalurkan termasuk jumlah yang tinggi, bahkan tertinggi kedua setelah Kabupaten Grobogan.

⁸ SE Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 19 tahun 2020

Tetapi jumlah siswa yang menerima pencairan di Kota Semarang pada tahun 2020 baru mencapai angka 57% dari 100%.

Gambar 1.2
Grafik penerima dana Program Indonesia Pintar Jenjang SMP
Tahun 2018-2020 Kota Semarang



Sumber: Olahan data penulis

Berdasarkan data Penyaluran Dana Program Indonesia Pintar Tahun 2020 Kota Semarang mengalami penurunan jumlah siswa penerima pencairan dana Program Indonesia Pintar dari tahun 2018 hingga tahun 2020 seperti pada gambar 1.1. Pada tahun 2018 jumlah siswa penerima pencairan Program Indonesia Pintar jenjang SMP Kota Semarang sebanyak 17.886 siswa dari 18.553 siswa yang disalurkan. Sedangkan di tahun 2019 jumlah siswa yang menerima pencairan mengalami penurunan, jumlah siswa yang menerima pencairan di jenjang SMP di Kota Semarang menjadi 13.779 siswa dari 15.119 siswa yang diajukan. Sedangkan di tahun 2020, jumlah siswa penerima pencairan dana Program Indonesia Pintar pada jenjang SMP di Kota Semarang berjumlah 12.380 siswa dari 21.552 siswa yang disalurkan⁹. Dari jumlah tersebut dapat diketahui perbedaan yang cukup besar

⁹ Kemdikbud.go.id, "Data Penyaluran Dana Program Indonesia Pintar Tahun 2020", Diakses dari <https://pip.kemdikbud.go.id/wilayah/data2020/03>, Pada Tanggal 10 November 2020.

antara jumlah siswa yang disalurkan dengan jumlah siswa yang menerima pencairan.

Dari permasalahan yang sudah dijabarkan Program Indonesia Pintar seharusnya menjadi bentuk bantuan uang tunai yang akan sangat membantu dan dibutuhkan, terutama di masa pandemi *covid-19* yang menyebabkan naiknya tingkat pengangguran dan kemiskinan. Terlebih Program Indonesia Pintar itu sendiri merupakan program nasional yang secara ideal sangat bagus. Sehingga perlu diketahui pelaksanaan Program Indonesia Pintar yang harus tetap berjalan di tengah masa pandemi *covid-19*, dengan judul penelitian “Program Indonesia Pintar dan Pandemi di Kota Semarang tahun 2020-2021”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang, dibutuhkan rumusan masalah dengan unsur-unsur yang jelas dan akan dijadikan pokok bahasan dalam penelitian. Rumusan masalah tersebut yaitu:

- 1.2.1 Bagaimana pelaksanaan Program Indonesia Pintar pada masa pandemi Di Kota Semarang tahun 2020-2021?
- 1.2.2 Bagaimana upaya dari Dinas Pendidikan Kota Semarang dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar pada masa pandemi tahun 2020-2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan yang hendak dicapai, tujuan tersebut yaitu :

- 1.3.1 Untuk menjelaskan pelaksanaan Program Indonesia Pintar pada masa pandemi jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Semarang tahun 2020-2021.
- 1.3.2 Untuk menjelaskan upaya yang dilakukan Dinas Pendidikan Kota Semarang dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) di masa pandemi tahun 2020 dan pada tahun selanjutnya yaitu tahun 2021.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat teoritis maupun manfaat praktis bagi setiap orang yang membacanya.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian dalam ilmu politik dan pemerintahan secara teoritis diharapkan dapat membantu ilmu pengetahuan dalam hal ini, terutama dalam pelaksanaan tindakan pemerintah selama masa pandemi. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat membantu pembaca untuk memiliki pemahaman yang lebih baik tentang upaya pemerintah untuk menciptakan inisiatif pendidikan selama masa pandemi. Sehingga ide-ide baru untuk program pendidikan dapat dikembangkan dan disempurnakan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam mengambil keputusan, khususnya tentang Program Indonesia Pintar bagi siswa. Selain itu, sebagai faktor yang perlu dipertimbangkan saat melakukan evaluasi secara keseluruhan terkait Program Indonesia Pintar selama masa pandemi Di Kota Semarang.

1.5 Tinjauan Pustaka

Pada tinjauan pustaka akan dipaparkan hasil penelitian yang dapat dijadikan referensi atau menambah informasi sekaligus yang dapat digunakan membandingkan penelitian saat ini dengan penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini menggunakan sumber dari lapangan dan menggunakan beberapa pustaka sebagai acuan pembanding. Karena penelitian yang menjelaskan secara khusus tentang “Program Indonesia Pintar dan Pandemi di Kota Semarang tahun 2020–2021” belum ada sebelumnya.

Terdapat variasi antara temuan penulis dan penelitian sebelumnya. Persamaannya berkaitan dengan Program Indonesia Pintar dan kesulitan atau hambatan yang dihadapi selama pelaksanaannya. Sedangkan hal yang menjadi pembeda dengan penelitian penulis yaitu pada pelaksanaan Program Indonesia Pintar yang dilaksanakan di masa pandemi. Dalam penelitian ini akan diketahui pelaksanaan Program Indonesia Pintar pada masa pandemi dan juga upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Pelaksanaan Program Indonesia Pintar baik pada pemerintah daerah terkhususnya Dinas Pendidikan Kota Semarang, ataupun pelaksanaan pada SMP (Sekolah Menengah Pertama) di Kota Semarang. Kemudian

penulis juga akan melakukan penelitian terhadap upaya yang dilakukan Dinas Pendidikan Kota Semarang dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar di masa pandemi pada tahun 2020 dan tahun selanjutnya yaitu tahun 2021. Hal yang menjadi pembeda kedua yaitu lokasi penelitian, dimana penulis memilih Kota Semarang sebagai lokasi penelitian, karena memiliki jumlah penerima yang diajukan dalam jumlah besar, tetapi justru jumlah yang dicairkan paling sedikit dalam lingkup Karesidenan Semarang. Dalam penelitian ini juga memilih sudut pandang kelembagaan, dimana penulis melihat peran dari Dinas Pendidikan Kota Semarang dan dari Sekolah Menengah Pertama (SMP) untuk mengetahui pelaksanaan Program Indonesia Pintar di masa pandemi di Kota Semarang tahun 2020 dan juga upaya yang diberikan Dinas Pendidikan Kota Semarang dalam menghadapi hal tersebut. Penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya dapat dilihat pada tabel 1.2.

Tabel 1.2
Tinjauan Pustaka

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Teori	Hasil Penelitian
	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Hartini Retnaningsih (2017).	Program Indonesia Pintar: Implementasi Kebijakan Jaminan Sosial Bidang Pendidikan (Studi di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan).	Teori tentang kebijakan jaminan sosial dan pendidikan	Hasil penelitian ini menunjukkan, implementasi PIP di Kota Kupang dan Kota Palembang belum optimal, akibat adanya intervensi dari elit politik lokal berupa pemaksaan nama-nama siswa yang harus diberi bantuan.

	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	Muhammad Sulhan dan Totok Sasongko. (2017).	Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Melalui Kartu Penjamin Sosial dan Kartu Indonesia Pintar pada Masyarakat (Studi Kasus di Kelurahan Kauman Kota Malang).	Teori Implementasi Kebijakan Pemerintah dan Teori Kemiskinan dalam masyarakat Bidang Sosial Ekonomi dan Pendidikan	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pengurangan angka kemiskinan melalui pendistribusian KPS dan KIP dilakukan melalui studi pendahuluan, survei serta pengecekan area yang dianggap memenuhi syarat menerima bantuan dari pemerintah.
3.	Saras Setyawati (2018).	Efektivitas Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Bagi Siswa SMK di Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap (Studi Permendikbud N0.12 Tahun 2015 Tentang Program Indonesia Pintar).	Teori Kebijakan Publik dan Teori Efektivitas	Hasil dari penelitian ini adalah masih banyaknya hambatan dalam pengimplementasian Program Indonesia Pintar termasuk pemalsuan data. Banyak penerima dana Program Indonesia Pintar yang tidak sesuai dengan kriteria.

Sumber: Olahan data penulis

1.6 Landasan Teori

Landasan teori sangat penting karena berfungsi sebagai tempat penemuan teori dan konsep yang kemudian dapat dijadikan sebagai landasan teori bagi kajian yang dilakukan. Dasar ini harus ditonjolkan agar penelitian mempunyai dasar yang kokoh. Teori atau konsep yang akan diterapkan dalam penelitian ini adalah implementasi kebijakan.

Implementasi merupakan tahapan dari proses kebijakan. Dimana setiap kebijakan publik memiliki konsep pedoman yang harus dipatuhi selama implementasi. Implementasi dicirikan sebagai tahap paling kritis dari proses kebijakan, karena suatu kebijakan harus diimplementasikan agar manfaatnya dapat dirasakan. Implementasi dipahami sebagai proses yang menghubungkan antara tindakan dengan suatu perangkat tujuan, yang kemudian diharapkan mampu mencapai tujuan dari kebijakan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Secara umum Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan istilah implementasi sebagai pelaksanaan atau penerapan¹⁰.

Menurut Van Meter dan Van Horn proses implementasi adalah “*those action by public or private individuals groups that are directed the achievement of objectives set forth in prior decisions*” yang mengacu pada individu, pejabat, pemerintah, atau entitas swasta yang mengambil tindakan untuk memajukan tujuan kebijakan¹¹. Ketika tujuan kebijakan telah ditetapkan, tahap implementasi dapat dimulai. Dalam penelitian ini, teori implementasi yang akan digunakan sebagai dasar analisa penelitian berpijak dari teori implementasi kebijakan CG Edward III.

¹⁰ Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Tahun 1990, halaman 327.

¹¹ Abdul Wahab, *Analisis kebijaksanaan dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara*, Edisi kedua Bumi Aksara, Jakarta, 1997, halaman 65.

1.6.1 Implementasi Kebijakan CG Edward III

CG Edward III menguatkan pandangan Van Meter dan Van Horn, bahwa tanpa implementasi yang efektif keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasi kebijakan merupakan aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input demi menghasilkan output bagi masyarakat¹². Dengan demikian tujuan kebijakan akan tercapai apabila implementasi sudah dipersiapkan dengan baik. Menurut C G Edward terdapat empat variabel yang penting dan besar pengaruhnya dalam implementasi, variabel tersebut adalah :

a. Komunikasi

Komunikasi yang berhubungan dengan disampaikannya ide, keterampilan, peraturan, informasi dan lain-lain adalah faktor penting yang memiliki pengaruh dalam implementasi kebijakan. Komunikasi membutuhkan sarana tertentu yang nantinya digunakan untuk menyampaikan informasi atau ide atau peraturan kepada pihak-pihak yang berhak menerima komunikasi tersebut¹³.

Implementasi kebijakan yang efektif mensyaratkan bahwa pelaksana keputusan memahami apa yang harus dicapai. Komunikasi yang ada harus tepat dan sederhana agar dapat dipahami oleh pelaksana. Selain itu petunjuk-petunjuk yang diberikan pelaksana tidak hanya cukup dapat

¹² Haedar Akib, "Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana", *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 1 No.1, Tahun 2010, halaman 1.

¹³ Leo Agustino. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi ke-2)*. CV. Alfabeta, Bandung, 2020, halaman 157.

dipahami tetapi juga harus jelas. Komunikasi adalah metrik yang menunjukkan seberapa efektif suatu kebijakan telah disajikan dengan interpretasi yang sama dan dapat diterapkan secara konsisten dengan aparat pelaksana kebijakan¹⁴.

b. Sumber Daya

Komunikasi dalam bentuk instruksi implementasi mungkin telah disajikan dengan hati-hati, konsisten, dan jelas, tetapi jika pelaksana tidak memiliki sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, implementasi cenderung gagal. Dengan demikian, diperlukan sumber daya yang memadai dan berkualitas, serta sumber daya yang memiliki kewenangan, informasi yang dimiliki oleh sumber daya, serta sarana dan prasarana yang tersedia untuk sumber daya. Hal ini akan secara langsung mendukung tanggung jawab implementasi kebijakan yang telah diidentifikasi sebelumnya. Terdapat variabel-variabel yang digunakan untuk melihat sejauh mana sumberdaya mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu staf, Informasi, kewenangan, dan fasilitas¹⁵.

Ada berbagai elemen dalam variabel sumber daya, yang pertama adalah staf. Tidak cukup hanya menambah jumlah pekerja dan pelaksana dalam situasi ini, karena diperlukan tambahan orang dengan keterampilan dan kemampuan yang tepat (kompeten dan mampu) dalam hal implementasi kebijakan.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid*, hal 158-159.

Informasi adalah elemen sumber daya yang kedua. Informasi tentang cara pelaksanaan kebijakan dan informasi tentang data kepatuhan dari pelaksana terhadap aturan dan peraturan pemerintah yang ditetapkan digunakan dalam pelaksanaan kebijakan dalam dua cara tersebut.

Elemen berikutnya adalah wewenang. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Pada saat wewenang tidak ada, maka kekuatan para implementor dimata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan. Dalam satu sisi, efektifitas kewenangan diperlukan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan, tetapi di sisi lain efektifitas juga akan menurun apabila wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau demi kepentingan kelompoknya.

Elemen terakhir adalah fasilitas, bahkan jika pelaksana memiliki staf yang cukup, mengerti apa yang perlu dilakukan, dan juga memiliki wewenang untuk melaksanakan tanggung jawabnya, implementasi kebijakan akan gagal tanpa fasilitas pendukung seperti sarana dan prasarana.

c. Sikap

Dalam konteks ini, sikap positif berkaitan dengan sikap orang-orang yang akan bertanggung jawabkan pelaksanaan kebijakan yang sudah ditetapkan. Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh pola pikir dari mereka yang mengeksekusinya. Kebijakan lebih mungkin untuk dieksekusi sejalan dengan keinginan pengambil keputusan ketika pelaksana kebijakan memiliki sikap positif terhadap kebijakan. Di sisi lain, pelaksanaan suatu kebijakan menjadi lebih sulit jika perilaku atau pendapat para pelaksana berbeda dengan para pembuat keputusan¹⁶.

d. Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan salah satu komponen dari implementasi kebijakan. Birokrasi pada umumnya dikembangkan untuk menjalankan kebijakan tertentu dengan tujuan menyelesaikan permasalahan masyarakat dalam kehidupan modern. *Standar Operasional Prosedur* (SOP) adalah alat yang berharga dalam birokrasi untuk memodifikasi tugas di perusahaan yang memiliki prosedur perencanaan yang baik dan kontrol yang konsisten dengan program yang ditetapkan. Selain itu pada birokrasi juga terdapat karakteristik Fragmentasi, yang dalam hal ini mengacu pada pembagian tanggung jawab pelaksanaan kegiatan yang tidak tumpang tindih dengan tetap mencakup pembagian tugas umum yang terkait dengan pelaksanaan suatu kebijakan¹⁷.

¹⁶ *Ibid*, hal 162.

¹⁷ Winarno. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Media Press, Yogyakarta, 2005, hal 150.

1.7 Definisi Konsep

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020, Program Indonesia Pintar adalah program jaminan sosial di bidang pendidikan yang bertujuan untuk mengatasi masalah pelibatan masyarakat dalam pendidikan, khususnya di kalangan masyarakat miskin. Program Indonesia Pintar dirancang untuk siswa usia enam hingga dua puluh satu tahun, dimulai dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Pada penelitian ini penulis memfokuskan pada di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar. Pelaksanaan Program Indonesia Pintar pada tahun 2020-2021 akan jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, karena akan dilakukan pada masa pandemi. Era pandemi yang dipicu oleh Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang menginfeksi seluruh dunia dan mulai menyebar ke Indonesia pada awal tahun 2020, memberikan pengaruh di berbagai sektor, termasuk sektor pendidikan. *Covid-19* telah melahirkan aturan dan kebijakan baru yang ditujukan untuk mitigasi atau pemberantasan pandemi. Dengan adanya virus *Covid-19*, individu tidak dapat atau dipaksa untuk tidak terlibat dalam pertemuan langsung, yang mengharuskan penggunaan pembelajaran jarak jauh.

Aspek yang akan diteliti dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Semarang pada masa pandemi *Covid-19* yaitu :

1. Proses implementasi Program Indonesia Pintar di Kota Semarang pada masa pandemi *Covid-19* dengan menggunakan pendekatan teori George Edward III
 - a. Komunikasi
 - b. Sumber Daya

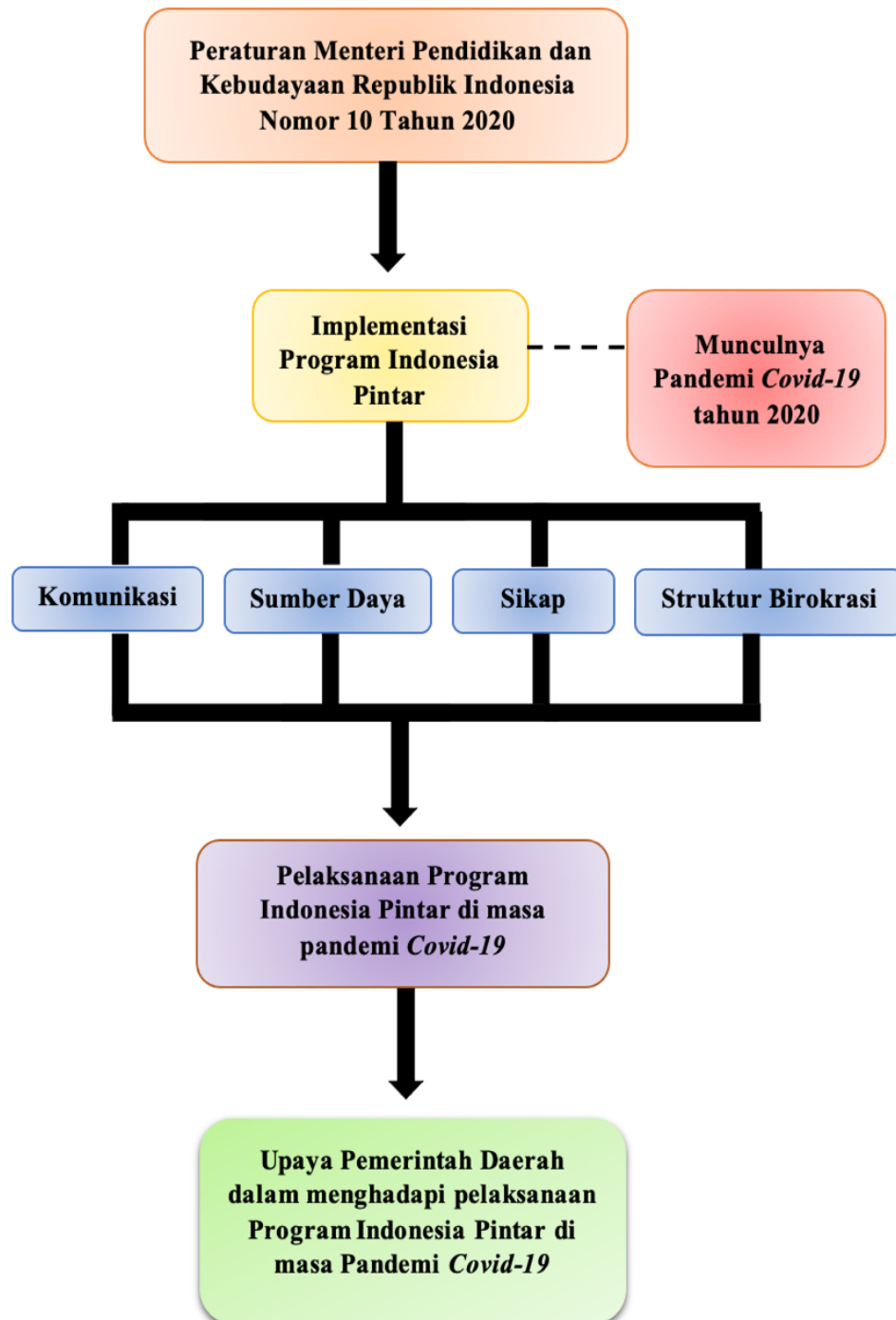
c. Sikap

d. Struktur Birokrasi

2. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Semarang dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar di Kota Semarang pada masa pandemi *Covid-19* tahun 2020-2021.

1.8 Kerangka Pemikiran

Gambar 1.3
Model Kerangka Pemikiran Implementasi Kebijakan



Sumber: Olahan data penulis

1.9 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara ilmiah dalam mendapatkan data yang memiliki tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah yang dimaksudkan yaitu kegiatan penelitian tersebut didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yang berupa rasionalitas, empiris, dan sistematis. Dalam ciri rasionalitas, penelitian tersebut dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga dapat dijangkau oleh nalar dan pikiran manusia. Kemudian pada ciri empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, dengan demikian orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara yang digunakan. Dan pada ciri sistematis diartikan proses yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Langkah-langkah tertentu yang bersifat logis¹⁸.

1.9.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dimana menurut Creswell penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang mendefinisikan sebagai suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral dengan melakukan wawancara kepada peserta penelitian atau partisipan dengan mengajukan pertanyaan yang umum dan agak luas, yang kemudian informasi tersebut dikumpulkan, dan diinterpretasi lebih dalam¹⁹. Dalam penelitian kualitatif, banyak melibatkan peneliti untuk memahami settingan dari penelitian dikarenakan para peneliti kualitatif perlu untuk menjelaskan sejumlah

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2008, halaman 46.

¹⁹ John W. Creswell. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Pustaka Belajar, Yogyakarta. 2016, halaman 217.

prosedur penelitian untuk menunjukkan hasil penelitian benar-benar konsisten dan reliabel.

Sedangkan jenis metode pendekatan yang digunakan dari penelitian ini yaitu studi kasus (*case study*). Studi kasus merupakan salah satu bentuk penelitian yang mengeksplorasi dari sistem-sistem terkait (*bounded system*) atau kasus. Pendekatan studi kasus merupakan suatu pendekatan yang mendeskripsikan objek/peristiwa secara umum maupun menyeluruh dalam suatu daerah atau sosial masyarakat melalui pemeriksaan secara rinci dengan kontekstual yang saling berkaitan satu sama lain²⁰.

1.9.2 Lokasi Penelitian

Merupakan situs tempat penulis memperoleh data penelitian primer dan sekunder. Penelitian dilakukan di Dinas Pendidikan Kota Semarang sebagai instansi penghubung antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, selain itu juga dilakukan penelitian di SMP Negeri 33 Kota Semarang, SMP Negeri 15 Kota Semarang, dan SMP Mardisiswa 1 Kota Semarang yang termasuk dalam pengimplementasian Program Indonesia Pintar.

²⁰ Creswell dalam J.R. Raco. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulan*. PT. Gramedia Widiasarana, Jakarta. 2010, halaman 49.

1.9.3 Subjek Penelitian

Subjek Penelitian merupakan orang atau sekelompok orang yang mengetahui dan paham betul mengenai apa yang sedang diteliti, yaitu seseorang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian²¹. Subyek penelitian kemudian akan diidentifikasi dan dilibatkan dalam proses pengumpulan data. Subyek inilah yang disebut sebagai informan atau narasumber dalam penelitian kualitatif.

Pada penelitian ini metode pengambilan sampel yang dilakukan untuk menentukan informan yaitu menggunakan teknik *purposive sampling* dimana memiliki arti bahwasannya penentuan informan ditentukan dengan kebutuhan yang diperlukan dalam penelitian. Informan dalam penelitian ini berperan sebagai objek untuk menggali segala informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Informan atau narasumber yang dipilih antara lain birokrat pada Dinas Pendidikan Kota Semarang, dan beberapa Kepala Sekolah Menengah Pertama atau penanggung jawab Program Indonesia Pintar di Kota Semarang yang termasuk dalam pengimplementasian Program Indonesia Pintar. Informan atau narasumber untuk mendukung keakuratan data yang diperoleh antara lain :

1. Purwanto selaku staf bidang Sekolah Menengah Pertama (SMP) Dinas Pendidikan Kota Semarang, yang sekaligus panitia pelaksana Program Indonesia Pintar.
2. Muji Retno Wati selaku penanggung jawab pelaksanaan Program Indonesia Pintar di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 33 Kota Semarang.

²¹ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2008, Halaman 188 .

3. Eko Sucipto selaku penanggung jawab pelaksanaan Program Indonesia Pintar di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 15 Kota Semarang.
4. Palupi selaku penanggung jawab pelaksanaan Program Indonesia Pintar di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Mardasiswa 1 Kota Semarang.

1.9.4 Sumber dan Jenis Data

Jenis data yang digunakan yaitu data penelitian kualitatif, dimana data tersebut merupakan data yang diperoleh peneliti dari mengumpulkan dan menggali beberapa informasi yang ada pada pelaksanaan Program Indonesia Pintar jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Semarang. Dalam proses pengumpulan data, peneliti dapat menggunakan sumber data berupa:

1.9.4.1 Data Primer

Data Primer adalah data yang didapat secara langsung dari temuan peneliti yang pengetahuannya berasal dari observasi dan wawancara yang dilakukan dengan informan untuk menggali mengenai rangkaian informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan wawancara yang sebelumnya telah disediakan pedoman pertanyaan.

1.9.4.2 Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui penelusuran data olahan dari lembaga yang berwenang serta beberapa data pelengkap seperti literatur, buku, surat kabar, jurnal ilmiah, internet atau bagan dan dokumen yang terkait dengan penelitian ini. Informasi atau data tersebut diperoleh dengan membaca, mempelajari, dan juga memahami.

1.9.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah-langkah pengumpulan data dengan mengumpulkan informasi melalui observasi dan wawancara, baik yang terstruktur maupun tidak, dokumentasi, materi-materi visual, serta usaha merancang protokol untuk merekam atau mencatat informasi²². Lebih lanjut Creswell mengungkapkan masih ada beberapa langkah-langkah yang wajib dilakukan peneliti pada pengumpulan data, yaitu:

1. Mengidentifikasi lokasi-lokasi atau individu-individu yang dipilih pada proposal penelitian.
2. Menjelaskan jenis-jenis data yang dikumpulkan meliputi dalam bentuk observasi, wawancara, dan dokumentasi.
3. Menentukan jenis-jenis taktik yang akan digunakan menurut kajian kelebihan & kelemahan masing-masing taktik.
4. Mengembangkan taktik-taktik pengumpulan data yang dipakai untuk mengumpulkan data.

Pada penelitian ini teknik pengumpulan data didapatkan dengan cara melakukan wawancara dan dokumentasi, didukung dengan beberapa informasi lainnya terkait dengan topik penelitian yang diperoleh dari para informan yang telah ditentukan dan dianggap berkompeten dalam memberikan informasi yang dibutuhkan.

²² John W. Creswell. *Op.Cit*, hal 266.

1.9.6 Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data yang diperoleh dengan sistematis sehingga mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data ini kemudian dibagi menjadi tiga alur yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

1.9.6.1 Reduksi Data

Reduksi data adalah proses memilih dan menyederhanakan data yang diperoleh selama pengumpulan data sehingga kesimpulan dari sebuah penelitian dapat ditemukan. Dalam proses ini peneliti harus dapat menajamkan hasil analisis agar simpulan yang diperoleh dapat menemukan kenyataan-kenyataan yang sesungguhnya secara sederhana namun menyeluruh²³.

1.9.6.2 Penyajian Data

Penyajian data adalah akumulasi informasi yang dijabarkan untuk menarik sebuah kesimpulan. Pada penelitian kualitatif penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, *flowcard* dan lain sebagainya. Dengan menjabarkan data tersebut, maka peneliti akan mudah untuk memahami apa yang terjadi serta merencanakan tindakan selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami dalam data tersebut²⁴.

²³ Hardani et all., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, CV. Pustaka Ilmu Group, Yogyakarta. 2020, halaman 164.

²⁴ *Ibid*, hal 167.

1.9.6.3 Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dihasilkan selama penelitian dan proses reduksi data. Setelah data yang memadai telah dikumpulkan, kesimpulan awal ditarik, dan setelah semua data dikumpulkan, kesimpulan akhir ditarik. Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan seharusnya merupakan hasil baru. Kesimpulan ini merupakan inti dari temuan penelitian yang harus dibuat secara relevan sesuai dengan topik penelitian.